

KERJA SAMA MULTILATERAL INDONESIA SEBAGAI STRATEGI PERLAWANAN TERHADAP MARITIME PIRACY DI LAUT SULU

Aisyah Jasmine Maulana^{1*}, Thania Apri Wijaya²

^{1,2} Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Email: icha.maulana02@gmail.com

Email: thaniaavri@gmail.com

ABSTRACT

This study reviews Indonesia's Multilateral Cooperation as a Counter Strategy Against Maritime Policy in the Sulu Sea. This study aims to describe Indonesia's multilateral cooperation, and the impact of Indonesia's multilateral cooperation in the Sulu Sea. This type of research is qualitative research where information and data are collected systematically and contextually, through online research, library research, and case study research. This research wants to find out how the trilateral cooperation efforts carried out by the countries of Indonesia, Malaysia and the Philippines are in the face of threats to security stability in the Sulu Sea. In the efforts made by the three countries to be able to maintain security stability by conducting Maritime Command Centers, Maritime Trilateral Patrols, Trilateral Air Patrols and port visits.

Keyword: Trilateral, maritime piracy, Sulu

ABSTRAK

Studi ini mengulas tentang Kerja Sama Multilateral Indonesia sebagai Strategi Perlawanan Terhadap Kebijakan Maritim di Laut Sulu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kerjasama multilateral Indonesia, dan dampak kerjasama multilateral Indonesia di Laut Sulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana informasi dan data dikumpulkan secara sistematis dan kontekstual, melalui online research, literature research, dan case study research. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana upaya kerja sama trilateral yang dilakukan oleh negara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menghadapi adanya ancaman stabilitas keamanan di Laut Sulu. Dalam upaya yang dilakukan ketiga negara tersebut agar dapat menjaga adanya stabilitas keamanan ini dengan melakukan Maritime Pusat Komando, Patrol Maritime Trilateral, Patroli Udara Trilateral dan kunjungan pelabuhan.

Kata Kunci: Trilateral, maritime piracy, Laut Sulu

PENDAHULUAN

Laut menjadi penghubung yang utama terjadi diantara keberadaan dari negara-negara yang berada di dunia ini, meskipun hanya beberapa dari negara yang berada dalam kawasan *landlocked*, yang mana tentunya tidak akan menutup adanya kemungkinan bagi kebutuhan dari negara yang ada di atas laut. Adanya fenomena ini terjadi dikarenakan hampir 90% dari seluruh kegiatan lintas batas negara ini dijalankan dengan menggunakan jalur laut (Conway & Woodard, 2020). Beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia ini memiliki adanya permasalahan dalam keamanan yang berkaitan jalur laut. Salah satu dari perairan laut di Indonesia yang bermasalah karena dianggap mempunyai adanya nilai strategis yakni Laut Sulu. Dalam perairan ini memiliki trek pelayaran yang tentunya padat dan dianggap paling berbahaya setelah Selat Malaka.

Pada setiap tahunnya sebanyak 3900 kapal yang telah melewati kawasan ini dengan nilai barang bisa mencapai US\$40 miliar. Banyak dari negara-negara yang telah menggunakan lalu lintas laut ini guna kepentingannya guna melakukan perdagangan. Hal ini dikarenakan adanya potensi, kuantitas, dan letak dari kegiatan lautnya yang sangat padat. Tetapi hal ini juga berpotensi akan menyebabkan munculnya berbagai macam ancaman yang terjadi yakni penyelundupan senjata, pelanggaran wilayah dikarenakan memiliki posisi yang berbatasan dengan 3 negara yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina, adanya penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal hingga adanya pembajakan atau *piracy* (Laksmi Saraswati & Desy Arya Pinatih, 2020). Pada dasarnya Indonesia ini sebagai negara kepulauan yang mengharuskan bagi negara guna dapat menjaga adanya kesatuan dan keutuhan dalam wilayah nasional baik secara darat, udara ataupun laut. Laut Sulu ini tentunya akan berhubungan langsung dengan Laut Sulawesi yang mana menjadi perairan yang akan membentuk sebagai pintu masuk yang ditunjukkan ke daerah ALKI II yang mana terhubung ke Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok yang menuju pada Samudera Hindia.

Laut Sulu ini memiliki nilai strategis yang dikarenakan dengan adanya ribuan dari armada tanker berisi minyak dan dagang yang melalui Laut Sulu diakibatkan karena letak, potensi ataupun kualitas dari kegiatan laut yang berada pada didaerah jalur tersebut. Selain itu dikarenakan letaknya berada di puncak Segitiga Terumbu Karang Dunia yang mana telah mengiris menjadi tiga negara yakni, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal ini tentunya menjadi penambahan nilai bagi perairan tersebut (Isman, 2017). Tetapi pada dasarnya adanya keuntungan tersebut bukan hanya menghasilkan dampak yang baik, namun juga tentunya menghasilkan adanya dampak yang buruk mengenai ancaman yang terjadi di lautan seperti penangkapan ikan secara ilegal, pelanggaran wilayah yang mana dikarenakan berbatasan dengan ketiga negara, penyelundupan senjata dan human trafficking, bahkan hingga terdapat masalah mengenai perampokan kapal dan upaya penculikan dari awak kapal (*maritime piracy*).

Adanya pembajakan ini tentunya dianggap pula sebagai salah satu dari ancaman yang sangat kritis dalam upaya keamanan bagi maritime di wilayah Asia Tenggara. Seiring dengan berjalannya waktu, adanya kejadian daripiracy ini tentunya mendapat ancaman dan adanya perhatian yang diberikan dari *International Maritime Organisation* (IMO) dan *the International Maritime Bureau* (IMB) yang mana keduanya berfokus pada adanya isu terkait piracy. IMO ini ialah salah satu organisasi yang berada dibawah naungan dari PBB. Dalam hal ini piracy memiliki artian sebagai tindakan dengan memasuki kapal yang bertujuan agar dapat melakukan adanya pencurian atau tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan dengan adanya kekerasan dalam melakukan aksi pembajakan kapal. Sedangkan untuk IMB ialah bagian dari *International Chamber of Commerce* (ICC) yang mana diperkirakan akan mempunyai adanya kesamaan dalam agenda yang telah mencakup adanya aktivitas mengenai pembajakan dan perlawanan pada kapal secara yurisdiksi maritime dalam suatu negara.

Adanya kegiatan dari pembajakan yang berada di laut atau *maritime piracy* yang berada di Asia Tenggara ini terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya tidak dapat terlepas pula dari adanya pengaruh dari aksi teroris 9/11 dalam dunia internasional. Adanya kemunculan aktivitas pembajakan dan perampokan yang berada di laut ini tentunya dikarenakan adanya beberapa dari faktor yakni kondisi sosial dan ekonomi yang dianggap lemah, pengawasan yang lemah dari pemerintah dan adanya kapasitas dari negara. Selain itu dengan berkembangnya teknologi baru seperti posel, internet, dan navigasi satelit guna dapat mempermudah untuk dilakukannya aksi kriminal yang ada di lautan.

Maritime piracy yang telah terjadi di kawasan perairan Indonesia ini pada dasarnya telah banyak yang terjadi pada beberapa kawasan yakni, Selat Malaka, Teluk Thailand, Selat yang berada di antara Singapura dan Filipina, termasuk pula Provinsi Riau di Indonesia, Laut China Selatan hingga Laut Sulu yang mana berbatasan secara langsung dengan Malaysia, Filipina Selatan dan Indonesia (SD, 2020). Hal ini tentunya juga akan memberikan adanya ancaman yang serius terhadap kehidupan manusia, adanya perdagangan kapal baik secara internasional ataupun industry maritime local yang mana mencakup adanya penangkapan ikan dan perdagangan local. Dalam kawasan Asia Tenggara ini tentunya harus mengedepankan adanya keamanan maritime yang dijadikan sebagai fokus dalam keamanan, ancaman dalam kawasan maritime ini selanjutnya akan menjadi perhatian yang dilakukan secara bersama sebagai transnational security issue yang mana tentunya akan membutuhkan adanya perhatian baik dilakukan secara internasional ataupun multilateral.

Pembajakan dan perampokan yang dilakukan terhadap kapal ini pada dasarnya seperti yang ada dalam *Oceans Beyond Piracy* (OBP) di tahun 2016 yang mana telah terjadi adanya 129 insiden baik itu perampokan ataupun pembajakan yang ada di Asia, yang mana diantaranya mengenai pencurian dan pembajakan kapal kargo, adanya kesalahan dalam kegiatan yang mencurigakan lainnya. Dalam aktivitas pembajakan ini seringkali melakukan pemindahan sandera ke pantai yang mana mereka akan ditahan dalam jangka waktu yang relative lama dibawah adanya paksaan yang esktrim. Tawanan ini tentunya seringkali juga akan menjadi korban dari pelecehan yang mana akan hidup selalu dalam ketakutan merasakan dibunuh oleh para pelaku.

Indonesia menjadi salah satu dari negara kepulauan terluas yang mana dengan adanya perairan dan panjang garis pantar yang luas dapat menyebabkan adanya limitasi dari kapasitas yang dimiliki oleh TNI dan Polri dalam upaya menjaga seta menjamin adanya pertahanan dan keamanan untuk setiap daerahnya dari berbagai macam adanya ancaman yang sewaktu-waktu dapat muncul. Kesempatan ini tentunya akan dimanfaatkan oleh para pelaku dari kejahatan transnasional guna bisa melakukan aksinya khususnya maritime piracy. Kelompok redikal yang sering melakukan maritime piracy ialah Abu Sayyaf yang identic dengan terorisme kepada beberapa warga Indonesia. Laut Sulu ini dijadikan sebagai rute kapal tongkang yang berasal dari Indonesia ke Filipina Selatan yang mana biasanya akan memiliki muatan minyak ataupun batu bara. Adanya interaksi inilah yang memberikan kesempatan bagi kelompok Abu Sayyaf ini untuk dapat melakukan adanya pembajakan kapal dan penculikan di kawasan perairan Filipina. Dalam laporan ReCAAP sepanjang tahun 2016 ini tentunya telah terdapat sebanyak 16 kali adanya insiden mengenai penculikan kepada kru kapal yang berada di Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Melihat dengan banyaknya tindakan maritime piracy yang telah dilakukan oleh kelompok dari Abu Sayyaf kepada WNI ini mendorong penulis untuk menganalisis bagaimana kerja sama multilateral yang dilakukan sebagai bagian dari strategi keamanan untuk maritim Indonesia dalam melakukan penanggulangan perkembangan dari maritime piracy di Laut sulu.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Anggito & Setiawan, 2018). Dimana informasi dan data dikumpulkan secara sistematis dan kontekstual, melalui penelitian online, penelitian kepustakaan, dan penelitian studi kasus (Patton, 2009). Adapun tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki). Sedangkan, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan kualitatif telah dikembangkan untuk mengakses kualitas dan juga kekuatan dari hasil penemuan dari berbagai tipe studi dan komparasi (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya keamanan Laut Sulu Sulawesi

Laut Indonesia ini dijadikan sebagai jalur dari lalu lintas yang digunakan untuk perdagangan kapal baik berasal dari dalam ataupun luar negeri guna bisa melaksanakan adanya kegiatan dalam perdagangan ataupun ekspor dan impor. Laut Sulu ini menjadi laut yang memiliki adanya makna yang strategi digunakan dalam perdagangan di Indonesia, negara yang terletak di Asia Timur dan Pasifik Laut Sulu yang dapat dijadikan sebagai jalur perdangan dengan membantu dalam pertumbuhan ekspor dari Indonesia bagian timur serta tengah yang memiliki rata-rata dilalui oleh 10 kapal kargo pada tiap taunnya. Beberapa kapal tersebut mengangkut komoditas dan batu bara ke Jepang, Korea, China, dan Filipina. Bukan hanya itu, wilayah perairan ini juga memiliki nilai yang strategi dikarenakan adanya ribuan armad tanker mintak dan dagang yang melewati jalur tersebut karena letak, ataupun adanya kuantitas dalam kegiatan laut yang berada dalam jalur tersebut.

Tetapi pada dasarnya adanya keuntungan tersebut bukan hanya menghasilkan dampak yang baik, namun juga tentunya menghasilkan adanya dampak yang buruk mengenai ancaman yang terjadi di lautan seperti penangkapan ikan secara illegal, pelanggaran wilayah yang mana dikarenakan berbatas

dengan ketiga negara, penyelundupan senjata serta human trafficking, bahkan hingga permasalahan mengenai perampokan kapal dan penculikan dari awak kapal (*maritime piracy*). Adanya pembajakan ini tentunya dianggap pula sebagai salah satu dari ancaman yang sangat kritis dalam upaya keamanan bagi maritime di wilayah Asia Tenggara.

Dalam laporan ReCAAP sepanjang tahun 2016 ini tentunya telah terdapat sebanyak 16 kali adanya insiden mengenai penculikan kepada kru kapal yang berada di Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Melihat dari banyaknya tindakan maritime piracy telah dilakukan oleh kelompok dari Abu Sayyaf kepada WNI ini mendorong penulis untuk menganalisis bagaimana kerja sama multilateral yang dilakukan sebagai bagian dari strategi dari upaya keamanan bagi maritim Indonesia dalam melakukan penanggulangan perkembangan dalam maritime piracy yang berada di Laut sulu. ASG yang merupakan kelompok bentukan dari Filipina. Kelompok ini tentunya telah melakukan berbagai adanya kejahatan diperairan laut yang dilakukan kepada semua orang yang saat itu menjadi targetnya dengan melakukan penculikan awak kapal, memilika tebusan yang besr kepada para keluarga korban, perusahaan kapal ataupun pada negara.

2. Upaya Pemerintah Indonesia

Dalam ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pasal 101 mendefinisikan perompakan sebagai pembajakan, perampasan, dan penyanderaan kapal yang berada di perairan internasional. Sementara serangan yang berada di perairan teritorial dalam suatu negara dikenal sebagai perampokan bersenjata, itu diatur oleh resolusi IMO (Forster, 1986). Serangan di perairan teritorial menjadi kebijakan negara yang bersangkutan, dan penegakannya dilakukan semata-mata sesuai dengan hukum domestik negara tersebut. Perbatasan ini sering digunakan oleh para penjahat di laut guna dapat menghindari kejaran aparat keamanan. Kapal perang asing serta lembaga penegak hukum yang mana dalam hal ini hanya diperbolehkan untuk memasuki wilayah negara lain setelah mendapat izin dari negara yang bersangkutan. Ini juga menjadi salah satu dari tantangan dalam upaya menghadapi ancaman dari serangan kapal di sekitar perairan Sulu-Sulawesi. Mengamankan perairan Laut Sulu-Sulawesi ini tentunya hanya bisa dicapai melalui adanya kerja sama antarnegara.

Sejak 2015, serangan kapal yang berada pada perairan Sulu-Sulawesi meningkat, mendorong kerja sama Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Indonesia, Malaysia, dan Filipina mulai bertemu pada Mei 2016, menyepakati bahwa dalam ancaman pembajakan di laut, upaya penyanderaan seseorang, dan kejahatan secara transnasional yang lainnya dimana dapat mengurangi perniagaan, perdagangan, dan kepercayaan di seluruh kawasan. Ketiga negara ini telah melakukan adanya kesepakatan guna membahas kerja sama pengamanan Laut Sulu-Sulawesi. Dalam kesepakatan yang dikenal dengan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA), dimana ketiga negara berjanji guna melaksanakan adanya patroli secara bersama; meningkatkan adanya koordinasi untuk memberikan bantuan dengan cepat kepada penduduk serta kapal yang terancam; meningkatkan pula adanya pertukaran dalam hal informasi dan intelijen; dan membangun hotline komunikasi.

Saat itu, Komisi I DPR RI turut mendesak pemerintah agar dengan segera melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna dapat dengan segera mengimplementasikan adanya kesepakatan tersebut. Setelah melanjutkan beberapa adanya perundingan yang lainnya, ketiga negara ini secara resmi telah meluncurkan patroli maritim trilateral "Indomalphi" pada Juni 2017, yang selanjutnya diselesaikan pada Oktober 2017 dan menyepakati guna dapat melakukan patroli maritim trilateral di Laut Sulu-Sulawesi, patroli udara. Hingga perhelatan September 2018, kerja sama secara trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dapat dibilang berhasil meredam serangan perompak di Laut Sulu-Celebes. Tetapi, peristiwa September 2018 ini seharusnya menjadi peringatan keras yang ditunjukkan untuk ketiga negara tersebut bahwa bahaya keselamatan pelayaran tetap ada di Laut Sulu-Sulawesi. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji kerjasama yang telah terjalin dan bila perlu mempertimbangkan bentuk kerjasama lain yang melibatkan lebih banyak negara.

a. Kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia, Filipina

1) Patroli Maritim *Trilateral* atau *Trilateral Maritime Patrol* (TMP)

Kehadiran patroli maritim ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama sebelumnya antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Penetapan program tersebut merupakan bentuk urgensi mengingat tingginya angka kriminalitas di wilayah tersebut, yaitu Filipina pada saat

itu. Serangkaian masalah di perairan Sulu mendorong Indonesia, Malaysia, dan Filipina guna dapat meluncurkan kerja sama dalam hal keamanan di perairan tersebut. Perompakan di perairan Sulu ini bukan hanya bisa mengganggu keamanan dan kepentingan ketiga negara perbatasan itu, tetapi juga mengganggu keamanan dan kepentingan kawasan lain. Situasi ini mendorong ketiga negara untuk membahas Joint Declaration atau pernyataan bersama tentang keselamatan maritime yang mana menyepakati dalam empat hal yakni:

- a) membahas isu patroli bersama di perairan Sulu yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia, Filipina.
- b) memberikan adanya bantuan kepada para korban yang terkena penyerangan di perairan Sulu.
- c) mengidentifikasi focal point di setiap negara untuk memfasilitasi jaringan berbagi informasi dan pusat koordinasi darurat.
- d) membangun jaringan komunikasi darurat.

Pada 20 Juni 2016, Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengadakan pertemuan untuk melanjutkan pembahasan rencana patroli bersama.

Secara garis besar, pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen negara-negara di kawasan triborder guna dapat mengatasi adanya ancaman di kawasan Sulu-Sulawesi. Begitu juga dengan pertemuan ini. Ditetapkan, patroli yang dilakukan secara bersama di Laut Sulu-Sulawesi ini tentunya akan mengadopsi moda Malacca Strait Patrol (MSP). Pada 14 Juli 2018, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah menyepakati kerangka perjanjian kerja sama trilateral antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Pertemuan tersebut tentunya akan membahas mengenai Standard Operating Procedure (SOP) patroli laut bersama di Laut Sulu-Sulawesi yang mana setelahnya akan ditandatangani pada pertemuan yang terletak di Bali pada 2 Agustus 2018.

Pertemuan yang telah dilakukan ini menyepakati bahwa Indonesia, Malaysia dan Filipina akan bekerjasama dalam bentuk patroli maritim. Pola patroli ini dapat digambarkan sebagai gabungan dari berbagai jaringan dimana setiap aktor yang terlibat saling berhubungan. Pertukaran informasi adalah fokus dari mod ini, meskipun itu bukan pengaturan secara utama untuk patroli ini. Rancangan patrol ini dilakukan secara bersama ini diharapkan akan bisa berkembang menjadi rancangan yang lebih besar dan juga kompleks, dan yang semula sekadar berbagi informasi menjadi model yang lebih terarah. Pusat komando akan berfungsi menjadi pusat pemantauan dan analisis, mengirimkan sinyal ke patroli maritim guna mengambil tindakan. Dapat pula untuk diasumsikan bahwa mode patroli yang terkoordinasi ini akan sangat bergantung pula pada pusat informasi. Tentu saja, mode ini berisiko tumpang tindih atau menunda informasi yang diterima. Walaupun demikian, dengan menggunakan model ini akan mampu untuk menguatkan adanya kepekaan dari actor yang akan terlibat tentang situasi dan kondisi yang saat itu terjadi.

2) *Maritime Command Center (MCC)*

MCC ialah pusat komando kerjasama ini yang diluncurkan bersama TMP yang dilakukan pada 19 Juni 2017, dan masing-masing dari negara ini tentunya akan memiliki adanya MCC masing-masing yakni Indonesia yang terletak di Tarakan, perbatasan terjauh pulau Kalimantan, terdekat dengan Malaysia dan Filipina, Terletak di antara Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Malaysia di Tawau, Filipina di Zamboanga. Pengembangan MCC ini diharapkan dapat meningkatkan adanya kemampuan dalam hal komunikasi, pengawasan, dan komputersasi ini sehingga mampu menghasilkan keluaran kemampuan yang di deteksi dan analisis yang akurat dan cepat dalam pengambilan keputusan komando dan kontrol. Seperti pusat informasi yang mana informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk mendukung patroli terkoordinasi laut dan udara. Melalui adanya MCC juga diatur liaison officer dari tiap-tiap negara dan mereka akan hadir secara bergilir setiap kali latihan bersama dilaksanakan. Pusat Komando Maritim (MCC) di Tawau menerima panggilan darurat dari kapal. Informasi itu kemudian disampaikan kepada dua PKS lainnya di Tarakan dan Venko. Kedua PKS tersebut kemudian diserahkan kepada Tim Reaksi Cepat Indomalphi. Tim tersebut terdiri dari pesawat pengintai, helikopter, dan kapal yang berasal dari tiga negara, masing-masing bertindak sebagai pengintai dan penyergap. Jumlah kejahatan di perairan

Sulu-Sulawesi terus menurun hingga awal tahun 2019 setelah diresmikannya Trilateral Maritime Patrol Program, sebuah program patrol ini tentunya telah terkoordinasi di antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

3) Transit Corridor

Transit Corridor tersebut ialah salah satu dari upaya INDOMALPHI untuk mencegah adanya kejahatan yang berada di Laut Sulu yang mana melalui beberapa jalur yang diusulkan Malaysia dan Filipina dalam proses dari upaya pendirian INDOMALPHI. Koridor transit ini dibangun mengelilingi sekitaran kepulauan Sulu, dianggap sebagai basis bagi kelompok-kelompok yang mana akan melakukan adanya kejahatan yang berada di laut guna merumuskan rencana dan strateginya. Koridor transit ialah salah satu upaya dari untuk memberikan alternatif bagi kapal yang ingin melewati wilayah yang tentunya akan dianggap sebagai zona merah. Bukan hanya sebagai jalur alternatif, tetapi juga berupa bantuan secara maritim bagi kapal-kapal yang ingin melintas dan melanjutkan pelayaran melalui Laut Sulu.

4) Port Visit

Port Visit ialah bentuk kerjasama yang ditujukan untuk meningkatkan adanya *Confidence Building Measures* (CBM) yang terjadi diantara negara yang telah terlibat. Kunjungan pelabuhan sejauh ini telah dilakukan pula sebanyak 5 kali, yang pertama dilakukan di Filipina pada tanggal 13-15 November 2017, dan kunjungan pelabuhan kedua dilakukan di Tarakan pada tanggal 4-6 April 2018, Kunjungan pelabuhan ketiga dilakukan dari 4 hingga 6 September 2018 di Sandakan, kunjungan pelabuhan keempat dilakukan di Zamboanga pada 28-30 November 2018 dan kunjungan kelima di Tarakan pada 25-27 Februari 2019 (Komando Armada II, 2019). Acara berlangsung secara rutin dan sesuai dengan adanya jadwal acara yang telah disepakati secara bersama. Dalam kunjungan pelabuhan tersebut, beberapa agenda digelar, seperti latihan bersama, kontak antar personel dan kelompok kerja bersama yang fokus membahas masalah Laut Sulu.

Pembentukan INDOMALPHI merupakan bentuk upaya tiga negara untuk melawan ancaman Laut Sulu. INDOMALPHI adalah kerjasama sub-regional berdasarkan kepentingan yang sama. Kerjasama ini mencerminkan teori kompleks keamanan regional yang dijelaskan oleh Barry Buzan (dalam Pratama, 2015), yang menjelaskan bagaimana sekelompok negara dengan masalah keamanan saling terkait dan tidak akan bisa untuk dipisahkan. Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki masalah keamanan terkait Laut Sulu yang menjadi tempat serentetan kejahatan Abu Sayyaf dari 2014-2016 dalam berurusan dengan kejahatan maritim Kelompok Abu Sayyaf antara ketiga negara, dan Ketiga negara tersebut adalah negara pantai berbatasan secara langsung dengan Laut Sulu. Dalam teori ini juga tentunya akan menjelaskan bahwa kedekatan dari wilayah geografis menimbulkan saling ketergantungan, begitu pula INDOMALPHI, dimana dalam hal ini ketiga negara akan saling membutuhkan dalam upaya pengamanan Laut Sulu. Kemitraan yang berumur pendek ini menjadi pola kekerabatan yang terjalin antara ketiga negara, kini diperkuat dengan gencarnya ancaman Abu Sayyaf, dan mengantarkan ketiga negara ini akan membentuk komunitas keamanan, INDOMALPHI.

INDOMALPHI, ini dijadikan sebagai bentuk kerjasama antara 3 negara yang telah disebutkan, menitikberatkan pada ekonomi, keamanan, lingkungan dan masyarakat terlindungi dari adanya ancaman atau tindakan berbahaya di laut (Yudistira et.al, 2022). Konsep ini diasumsikan dalam penerapannya dijadikan pula sebagai tindakan yang preventif atau tanggap guna dapat melindungi wilayah maritim suatu negara dari adanya gangguan terutama dalam hal keamanan atau tindakan ilegal (Yudistira, et.al, 2022). INDOMALPHI terkait konsep ini hampir sama dalam implementasinya, INDOMALPHI merespon meningkatnya kriminalitas di Laut Sulu sambil melakukan adanya upaya pencegahan yang dilakukan terhadap adanya kemungkinan terjadinya tindakan serupa. Adanya penculikan dan perompakan yang mana akan dihadapi oleh INDOMALPHI ini tentunya akan sesuai pula dengan yang telah pada konsep tersebut sebagai tindakan yang akan melanggar hukum serta tentunya akan dapat meredakan.

KESIMPULAN

Laut Sulu ialah perairan yang tentunya sangat penting dalam kawasan Asia Tenggara yang mana terletak di sebelah Selat Malaka. Perairan ini dijadikan sebagai wilayah yang mana dilalui oleh kapal-kapal baik perdagangan atau hanya transportasi saja. Karena letaknya yang strategi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok perompak seperti Abu Sayyaf melakukan aksi pembajakan dan penculikan yang selanjutnya akan meminta tebusan baik kepada keluarga, perusahaan ataupun pada negara. Dalam mengatasi adanya permasalahan ini ketika negara yang berbatasan langsung dengan perairan Sulu ini melakukan kerja sama untuk membebaskan sandera yang bersifat militer ataupun dengan negosiasi. Kerja sama ini berbentuk Trilateral dari ketiga negara tersebut yang dijadikan sebagai bentuk kerjasama komprehensif yang dilakukan dalam upaya guna dapat menangani kejahatan yang ada di Laut Sulu. Kerja sama yang dilakukan ini dengan berbentuk patrol yang akan terkoordinasi dengan laut ataupun udara dari INDOMALPHI dengan memberikan adanya hasil positif dengan berbagai adanya armada kapal dan pesawat yang akan digunakan. Selain itu dengan menggunakan metode MCC dengan menjadi pusat informasi patrol yang akan terkoordinasi. Selanjutnya kerjasama juga didukung dengan adanya Port Visit yang didalamnya berisi mengenai latihan gabungan, forum untuk bertukar informasi, dan kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Conway, L. G., & Woodard, S. R. (2020). Integrative complexity across domains and across time: Evidence from political and health domains. *Personality and Individual Differences*, 155. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109713>
- Forster, M. J. (1986). International Maritime Organisation. *International Journal of Marine and Coastal Law*, 1(2). <https://doi.org/10.1163/187529986X00140>
- Isman, R. (2017). Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu Maritime. *Penelitian Politik LIPI*, 14(2).
- Laksmi Saraswati, A., & Desy Arya Pinatih, N. K. (2020). Strategi Keamanan Maritim Indonesia terhadap Maritime Piracy di Laut Sulu Tahun 2016. *Transformasi Global*, 7(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.6>
- Maya, A. J. (2018). Indonesia dan Rezim United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982: Lika-Liku Perjuangan dan Relevansi Kepentingan Maritim Era Kekinian. *Membangun Kedaulatan Maritim, Memperkuat Hubungan Internasional Indonesia*, 23-40.
- Patton, M. Q. (2009). Metode evaluasi kualitatif.
- Pratama, C. P. (2015). Central Asia as a Regional Security Complex from the Perspectives of Realism, Liberalism and Constructivism. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15(1). <https://doi.org/10.7454/global.v15i1.16>
- SD, H. A. (2020). REVIEW BUKU DIPLOMASI DAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MARITIM INDONESIA DALAM KONSTELASI POLITIK GLOBAL. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2).
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Yudhistira, A., Suwarno, P., Aris, T., & Okcavia, S. C. (2022). Pemahaman Terhadap Maritime Security, Maritime Safety dan Maritime Defense serta Perbedaannya dalam Konsep Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kemaritiman Nusantara*, 2(1), 1-12.